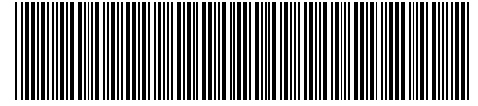




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.526732/2026**



DS:1620-8402-5909-0135

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 21.089.933.000 (DUA PULUH SATU MILIAR DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.089.933.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 21.089.933.000

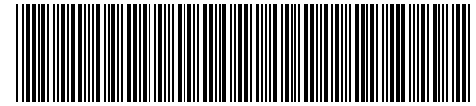
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026

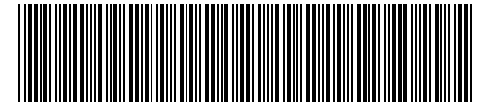


DS:1620-8402-5909-0135

Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.089.933.000
WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	20.000.000
WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	21.069.933.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1620-8402-5909-0135

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			21.089.933.000
Kegiatan	:	1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			20.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4,00	Unit, m2, Paket	20.000.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	4.00	Unit	20.000.000
Kegiatan	:	6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			21.069.933.000
	:	1. 01	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			
	:	2. 02	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			
	:	3. 03	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran			
	:	4. 04	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	21.069.633.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.800.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	21.067.833.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	300.000
Rincian Output	:	01 EBD.Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	300.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

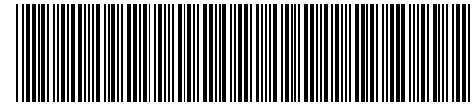
ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026

I B. SUMBER DANA



DS:1620-8402-5909-0135

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

				Pagu			Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	21.089.933.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	21.089.933.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1620-8402-5909-0135

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	15.725.151	5.344.782	20.000	-	-	21.089.933		
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	15.725.151	5.344.782	20.000	-	-	21.089.933		
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-	-	20.000	-	-	20.000		
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	20.000	-	-	20.000	01 . 51	
01	RM	-	-	20.000	-	-	20.000	175	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	15.725.151	5.344.782	-	-	-	21.069.933		
6986.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	15.725.151	5.344.482	-	-	-	21.069.633	01 . 51	
01	RM	15.725.151	5.344.482	-	-	-	21.069.633	175	
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	300	-	-	-	300	01 . 51	
01	RM	-	300	-	-	-	300	175	
JUMLAH		15.725.151	5.344.782	20.000	-	-	21.089.933		

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1620-8402-5909-0135

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526732) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526732	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.583.138	1.583.138	2.528.634	1.583.138	1.603.138	2.709.417	1.583.138	1.583.138	1.583.138	1.583.138	1.583.138	1.583.640	21.089.933
		BELANJA PEGAWAI	1.137.772	1.137.772	2.083.268	1.137.772	1.137.772	2.264.051	1.137.772	1.137.772	1.137.772	1.137.772	1.137.772	1.137.884	15.725.151
		BELANJA BARANG	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.756	5.344.782
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	005.01.WA.1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	005.01.WA.6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1.583.138	1.583.138	2.528.634	1.583.138	1.583.138	2.709.417	1.583.138	1.583.138	1.583.138	1.583.138	1.583.138	1.583.640	21.069.933
		51 BELANJA PEGAWAI	1.137.772	1.137.772	2.083.268	1.137.772	1.137.772	2.264.051	1.137.772	1.137.772	1.137.772	1.137.772	1.137.772	1.137.884	15.725.151
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.366	445.756	5.344.782
		PERKIRAAN PENERIMAAN	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	600	7.101
		- PNBP (425131)	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	600	7.101

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026
IV A. B L O K I R**



DS:1620-8402-5909-0135

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

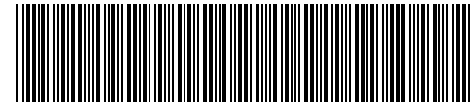
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.01.2.526732/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:1620-8402-5909-0135

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [01] Badan Urusan Administrasi
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526732] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

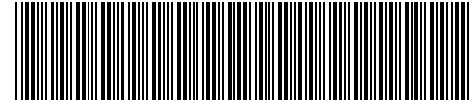
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

ttd.
Dr. SOBANDI, S.H., M.H.
NIP. 196902041996031004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526733/2026**



DS:4009-0074-8097-4444

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Sebesar : Rp. 76.311.000 (TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 76.311.000
Rp. 76.311.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	76.311.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 76.311.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



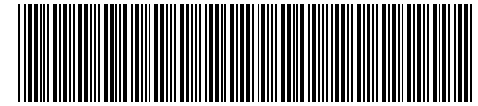
DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						76.311.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara						76.311.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		2. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		3. 01	Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		4. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		5. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		6. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		8. 02	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		9. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		10. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		11. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		12. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		13. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
		14. 08	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi			1,00	kegiatan		25.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara			1,00	kegiatan		25.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan			1,00	Perkara, Berkas Perkara		405.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			1,00	Perkara		405.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I A. 2

Perkara Hukum Perseorangan

Perkara, Berkas Perkara

Klasifikasi Rincian Output	3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.216.000
Rincian Output		:	01 QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96.00	Orang	33.216.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	17.690.000
Rincian Output		:	01 QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1.00	Perkara	17.690.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

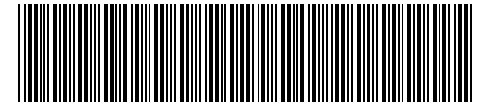
ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026

I B. SUMBER DANA



DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	76.311.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	76.311.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



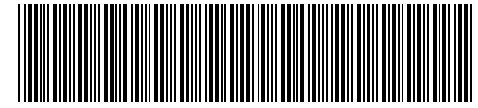
DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	-	76.311	-	-	-	76.311		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	76.311	-	-	-	76.311		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	76.311	-	-	-	76.311		
1059.AEA	Koordinasi (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	25.000	-	-	-	25.000	01 . 55	
01	RM	-	25.000	-	-	-	25.000	175	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	405	-	-	-	405	01 . 55	
01	RM	-	405	-	-	-	405	175	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	33.216	-	-	-	33.216	01 . 55	
01	RM	-	33.216	-	-	-	33.216	175	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	17.690	-	-	-	17.690	01 . 55	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Kewenangan : (KD)

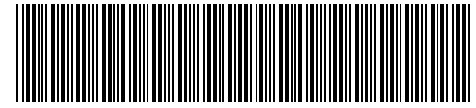
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	17.690	-	-	-	17.690	175	
JUMLAH		-	76.311	-	-	-	76.311		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526733	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	6.888	4.483	4.483	22.173	6.899	4.483	4.487	76.311
		BELANJA BARANG	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	6.888	4.483	4.483	22.173	6.899	4.483	4.487	76.311
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	6.888	4.483	4.483	22.173	6.899	4.483	4.487	76.311
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	6.888	4.483	4.483	22.173	6.899	4.483	4.487	76.311
		PERKIRAAN PENERIMAAN	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.231	8.240	98.781
		- PNBP (425232)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	73	810
		- PNBP (425233)	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	2.845	34.140
		- PNBP (425239)	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	5.322	63.831

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
IV A. B L O K I R**



DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526733] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526733/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:4009-0074-8097-4444

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [526733] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775